

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

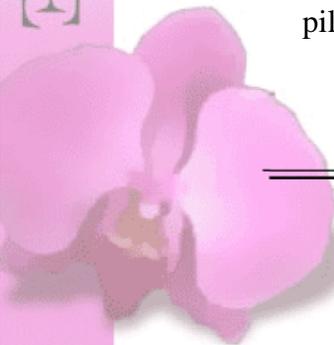
2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Pengertian

Menurut Werther dan Davis sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang (Moeheriono. 2012:5). Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati (Andini dan Yusrawati. 2015).

2. Tujuan Kompetensi SDM

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar memberikan kontribusi secara optimal sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia sebagai pilar penyangga utama dan penggerak roda suatu organisasi untuk



mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi yang akan dicapai (Yosefrinaldi, 2013).

3. Karakteristik

Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*) di tempat kerja.

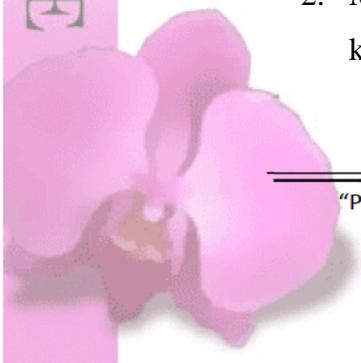
Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni:

- Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.
- Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
- Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi
- Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
- Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

4. Langkah-langkah meningkatkan Kompetensi SDM

Menurut Uha, Ismail (2014: 131) Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan formal PNS menuju pengembangan pembangunan dan membangun wawasan keilmuan.
2. Mengoptimalkan diklat dan peningkatann bintek untuk mewujudkan kompetensi dan keterampilan teknis.



3. Penyusunan standar kompetensi jabatan dalam menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
4. Pembinaan karier PNS yang terstruktur, profesional, dengan pola pikir general dan kerja secara spesial dalam riil produksi.
5. Pengembangan jabatan fungsional menuju spesialisasi dengan kebutuhantuntutan kerja.

2.1.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

1. Pengertian dan Tujuan

A. Pengertian

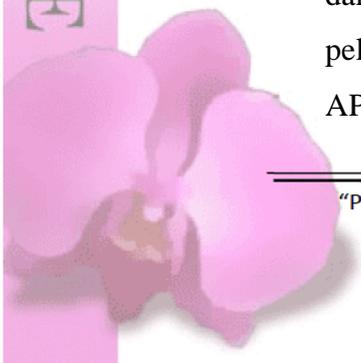
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri no.59 Tahun 2007). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dilaksanakan oleh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi:

1) Prosedur Akuntansi Penerimaan kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas.

2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan / atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas.



3) **Prosedur Akuntansi Aset Tetap/ Barang Milik Daerah**

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang digunakan SKPD dan PPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai / digunakan

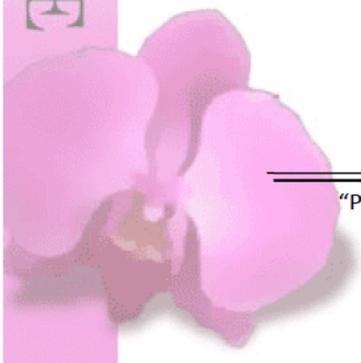
4) **Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas.

5) **Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut (*Halim : 2007*) :

- a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b. Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- c. Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian- kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.



- d. Mencakup Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran.

B. Tujuan

Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu: Pertanggung jawaban, manajerial dan pengawasan.

1. Pertanggung Jawaban

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja.

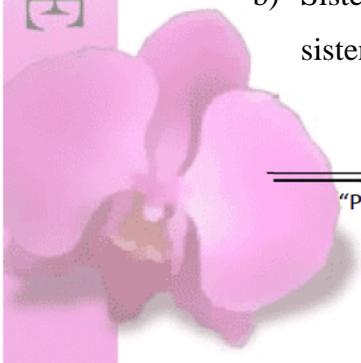
3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2. Karakteristik SAKD

SAKD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki beberapa karakteristik (Nordiawan, 2008), diantaranya:

- a) Basis akuntansi. Dalam hal ini, sistem akuntansi pemerintah menggunakan dua basis yaitu basis kas untuk Laporan Realisasi (LRA) dan basis akrual untuk neraca.
- b) Sistem pembukuan. Sistem pembukuan pada pemerintah menggunakan sistem pembukuan berpasangan.



3. Penerapan SAKD

Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas bila diaitkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas mereka (Goodhue dan Thompson 1995). Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*, misalnya) yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk memperoleh, memproses dan menyimpan informasi yang berkualitas juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe*, *mini*, *micro*),

perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000).

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup:

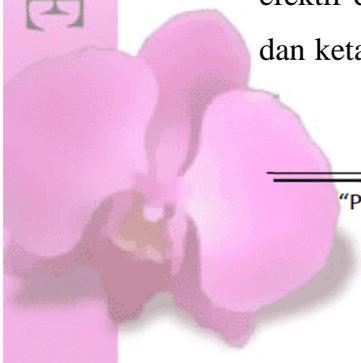
- pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Dalam penjelasan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan pemerintah dan pemda berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan (Anggraeni, 2014). Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan



pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

2. Tujuan pengendalian internal

Menurut Mardi (2014) sesuai dengan definisi AICPA pengendalian internal mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- 1) Menjaga harta kekayaan milik instansi.
- 2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi.
- 3) Meningkatkan efisiensi operasional.
- 4) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

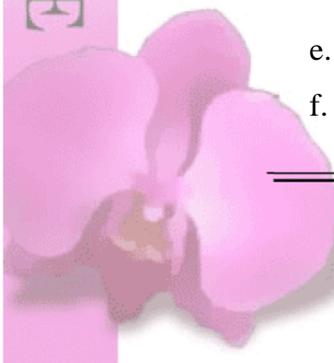
3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi :

A. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas (Indra, 2011:11) adalah :

- a. Nilai integritas dan etika. Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya;
- b. Komitmen terhadap kompetensi. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
- c. Filosofi dan gaya operasi manajemen;
- d. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan;
- e. Stuktur organisasi;
- f. Kerangka kerja bagi manajemen;



- g. Dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi;
- h. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada;
- i. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.

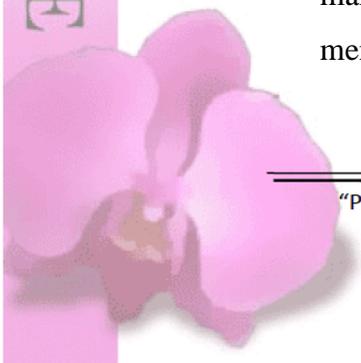
B. Penilaian Risiko.

Menurut Indra (2011:12) Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:

- a. Identifikasi Resiko. Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
- b. Analisis Resiko. Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

C. Kegiatan Pengendalian.

Menurut Indra (2011:12) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup :

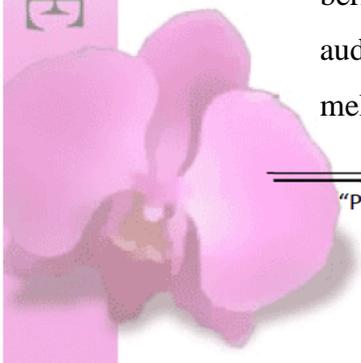


- a. Otorisasi yang memadai. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.
 - b. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
 - c. Pengecekan secara independen.
 - d. Pemisahan fungsi yang memadai. Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.
 - e. Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.
 - f. Peninjauan atas kinerja. Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.
- D. Informasi dan Komunikasi.

Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan (Indra, 2011:12). Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

E. Pemantauan.

Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu (Indra, 2011:13). Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan,



rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam melaksanakan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

4. Manfaat SPI Sistem pengendalian digunakan untuk pengendalian dalam akuntansi keuangan, dan memberikan jaminan terlaksananya strategi yang direncanakan pada instansi secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik. Adanya sistem pengendalian intern yang optimal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas guna meminimalkan resiko dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Harnoni. 2016). Sistem pengendalian internal yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dianggap layak, dan apabila terjadi kesalahan akan segera diketahui dan diatasi secara cepat. Sistem pengendalian internal yang baik harus didukung oleh sistem dan prosedur yang memadai, tenaga pelaksana yang memiliki integritas dan memenuhi kualifikasi profesi, dan adanya pemisahan tugas yang jelas setiap bidang kegiatan. Melakukan evaluasi terhadap rancangan dan menguji ketaatan dalam pelaksanaan struktur pengendalian internal adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh pengendalian tersebut dilaksanakan (Purwono. 2004: 125).

2.1.5 *Kualitas Laporan Keuangan Daerah*

1. Pengertian

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber dayaekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Haryanto dkk (2007:17) menyebutkan “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD”. LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 dalam Ratih (2010) tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya.

3. Syarat LKPD

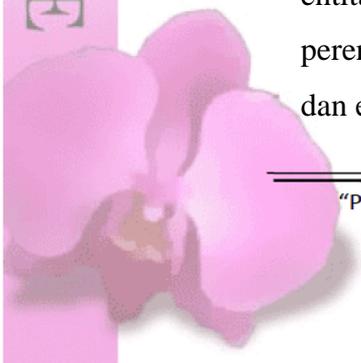
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara sistematis dan terstruktur mengisyaratkan laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah harus mengandung unsur :

a. Akuntabilitas:

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen :

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.



c. **Transparansi :**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*) :**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

4. **Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

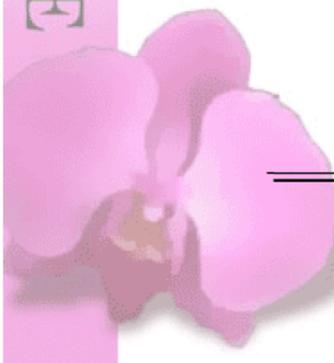
Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

1. **Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1) **Relevan.**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi



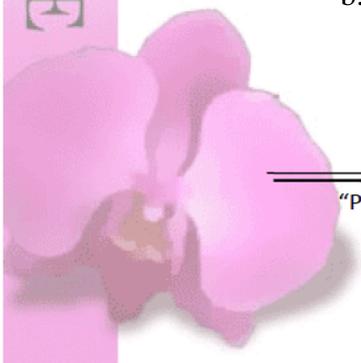
hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih



dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

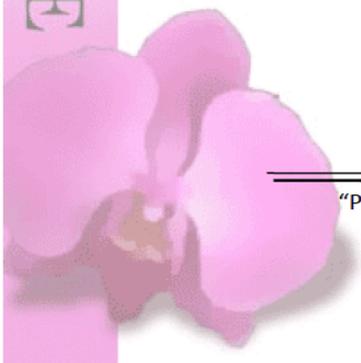
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Artikel	Tujuan Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan pemerintah daerah keuangan dan masalah / kendala yang dihadapi oleh SKPD di penyusunan laporan keuangan.	X1 : Faktor yang mempengaruhi X2: Implikasi kebijakan Y= Kualitas Laporan Keuangan Pemda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan.

2.	A. Dahri Adi Patra ¹ , Lanteng Bustami ² , Hasriani ³ (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah	X: Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Kadek Desiana Wati, Nyoman Tresna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar	X1 : kompetensi sumber daya manusia X2 : Penerapan SAP X3 : Sistem Akuntansi Keuangan daerah Y : kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR (STUDI PADA PPKD DAN SKPD)”

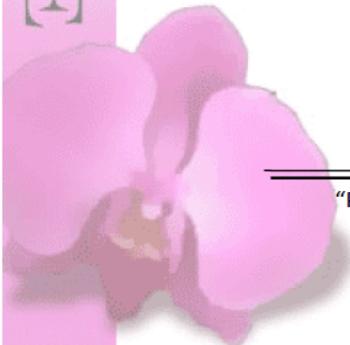
Author: **SESILIA BERNADINA ROSA CARVALLO** NPK: A.2014 1.32775

			akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.		
4.	Tuti Herawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	X1 : Sistem Pengendalian Intern Y : kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	1. Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan; 2. Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5.	Ahmad Faishol (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan.	X: pengendalian internal Y : kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Dari hasil pengujian secara parsial (uji t) dapat dijelaskan bahwa $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ dengan perbandingan angka sebesar $36,583 \geq 1,667$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan (uji F) didapatkan hasil bahwa $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$

"PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR (STUDI PADA PPKD DAN SKPD)"

Author: **SEILIA BERNADINA ROSA CARVALLO** NPK: A.2014 1.32775

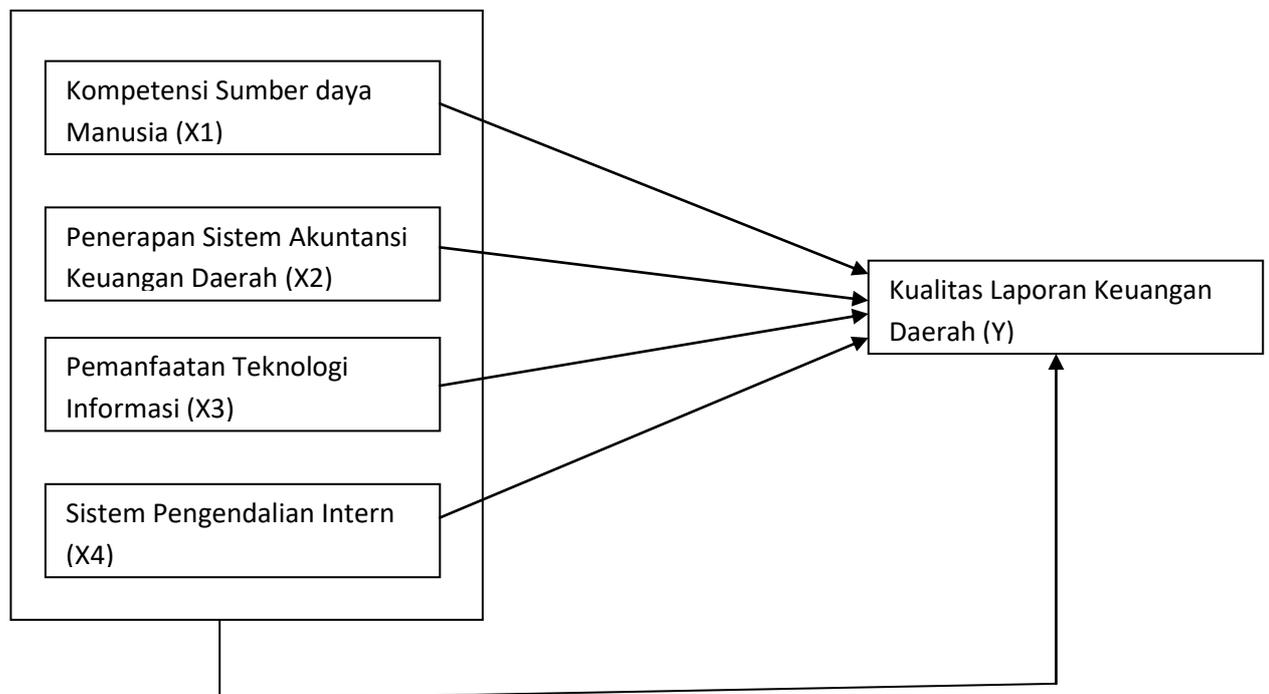
					dengan perbandingan angka $1338,328 \geq 3,98$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh simultan antara variabel sistem pengendalian intern terhadap variabel kualitas laporan keuangan.
6.	Silviana (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	X1: Sistem Informasi Akuntansi Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten di Jawa Barat. Penerapan sistem informasi akuntansi memberikan kontribusi sebesar 20,23% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Dari hasil analisis pengujian dapat disimpulkan bahwa Penerapan SIA berpengaruh terhadap kualitas LKPD.



2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengenai hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Model penelitian ini menggambarkan pengaruh variabel independen yang terdiri dari empat (4) variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau hipotesa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan; anggapan dasar. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis

tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang, kajian teori dan kerangka konseptual yang telah disusun maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

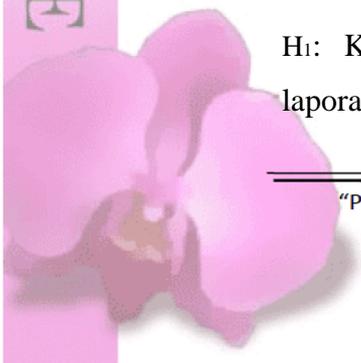
2.4.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Kualitas Laporan

Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Havesi, 2005 (dalam Indriasari, et al. 2008) kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Peningkatan kompetensi SDM dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu. Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan SKPD dan PPKD dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Subadriyah dan Anita Rahayuningsih (2015) yang menyatakan bahwa adanya kualitas sumber daya manusia terbukti yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah signifikansi 0,000 dan Critical Ratio 2.511. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur (SKPD dan PPKD)



2.4.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kata “Penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas bila dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan konsep atau aturan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang diterapkan baik di pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Pada dasarnya, sistem akuntansi yaitu suatu kesatuan apabila ada salah satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif LKPD (As Syifa dan Dul Muid, 2014). Oleh karena itu, SAKD yang memadai harus tersusun secara sistematis mulai dari awal pengumpulan data sampai dengan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar otomatis akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Darise (2008) yang menyatakan bahwa keandalan (reliability) informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran juga sangat rendah karena sistem

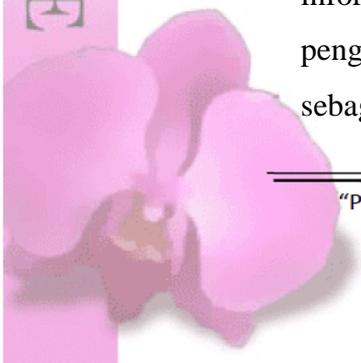
akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai.

Hal serupa diungkap oleh Mulyadi (2001) bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Adi Patra, Lanteng Bustami, dan Hasriani (2015) berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H₂: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur (SKPD dan PPKD)

2.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu. Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Jurnal dan Supomo (2002) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap perilaku berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut dalam menyelesaikan tugas. Komputer sebagai bagian dari teknologi informasi membawa perubahan besar bagi



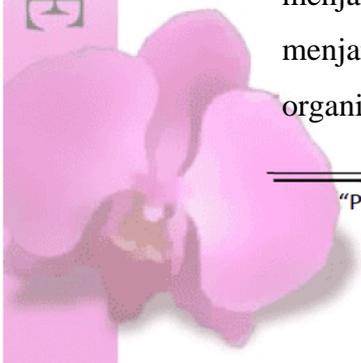
organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) menunjukkan bahwa pernyataan hipotesis dapat diterima, maka variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel TI yang bernilai 0,198 dengan tingkat signifikansi 0,029. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi pemanfaatan TI, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Yang didukung oleh penelitian Febrian Cahyo Pradono Basukianto (2015) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur (SKPD dan PPKD)

2.4.4 Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

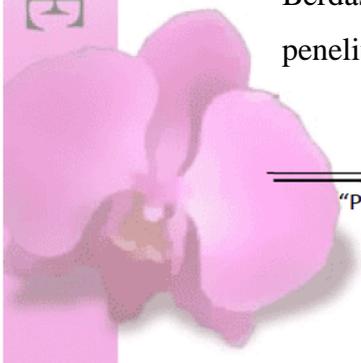
Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan



keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Dalam konteks penyusunan laporan keuangan, sistem pengendalian intern yang baik menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sehingga kualitas pelaporan keuangan berkaitan kualitas informasi yaitu Keterandalan dapat meningkat seiring dengan peningkatan sistem pengendalian intern organisasi.

Asmoko (2006) menyatakan bahwa dalam proses penyusunan anggaran sektor publik diperlukan sebuah sistem pengendalian intern yang efektif. anggaran menyediakan hubungan penting antara perencanaan dan pengendalian. Peran perencanaan dinyatakan dalam bentuk input yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas yang direncanakan. Peran pengendalian dilakukan dengan mempersiapkan anggaran dengan suatu tingkat pengendalian intern akan semakin tinggi tingkat keterandalan pelaporan keuangan. Febrian Cahyo Pradono Basukianto (2015) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tuti herawati (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ahmad Faishol (2016) dengan hasil pengujian secara parsial (uji t) dapat dijelaskan bahwa $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ dengan perbandingan angka sebesar $36,583 \geq 1,667$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah:



H₄: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur (SKPD dan PPKD)

2.4.5 Kompetensi sumber daya Manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara bersama - sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Selain sumber daya manusia yang kompeten, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berbasis akrual membutuhkan sistem akuntansi. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mampu memberikan output data berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi baik buruknya kualitas laporan keuangan adalah dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto (1995) teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas. Dukungan penggunaan teknologi informasi ini juga membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi, khususnya dalam mengantisipasi intensitas perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sering terjadi. Pemanfaatan sistem informasi yang tepat dapat mempermudah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Agar laporan yang dihasilkan semakin berkualitas maka diperlukan sistem pengendalian intern yang baik agar dapat menjamin keabsahan dan keandalan dari laporan keuangan yang

dihasilkan. Peranan sistem pengendalian intern ini sangat penting dalam melancarkan kegiatan penyusunan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrian Cahyo Pradono Basukianto (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian juga dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014) dengan hasil Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

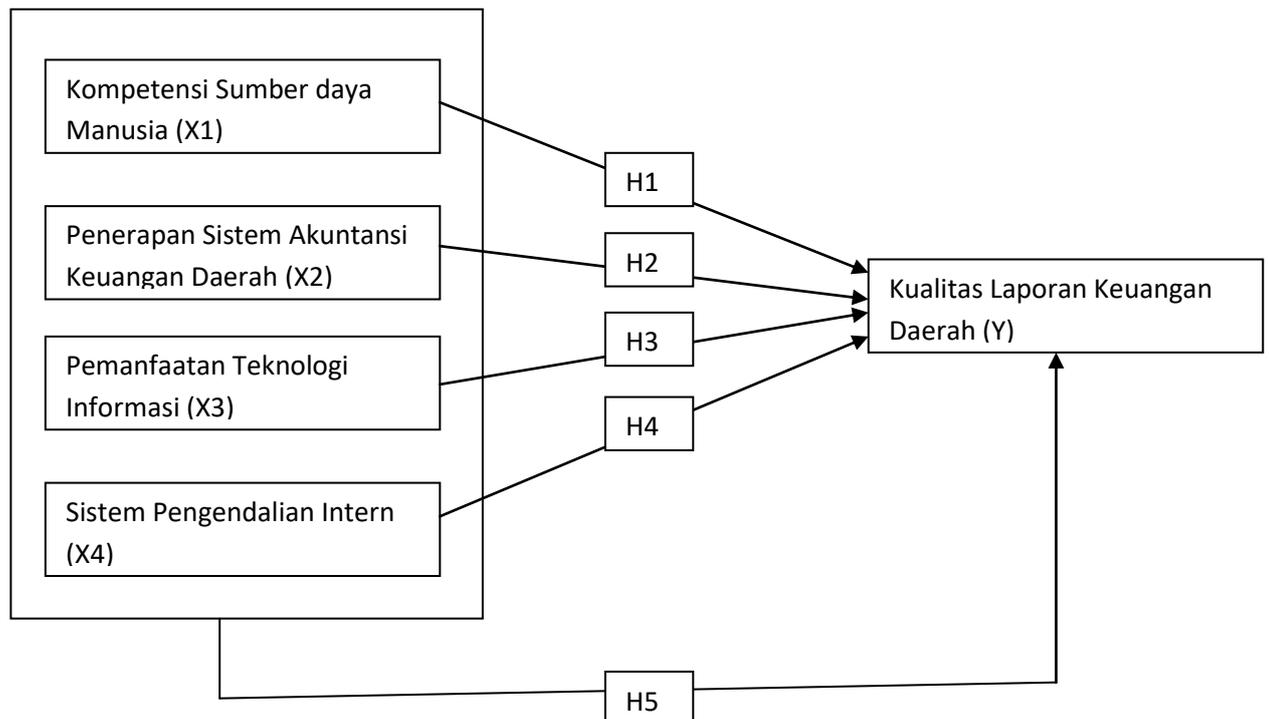
Berdasarkan penjelesaian di atas maka hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₅: Kompetensi sumber daya Manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara bersama - sama terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur.

2.5 Model Hipotesis

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka model hipotesis pada penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 2.2
Model Hipotesis



Adapun hipotesis penelitian ini meliputi:

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur (SKPD dan PPKD)

H₂: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur (SKPD dan PPKD)

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur (SKPD dan PPKD)

H₄: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur (SKPD dan PPKD)

H₅: Kompetensi sumber daya Manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara bersama - sama terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur.